

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama terakhir dan di wahyukan kepada Nabi yang terakhir pula, telah dijamin oleh Allah Swt kesempurnaan ajarannya. Sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-qur'an dan Sunnah. Akal diperlukan untuk mendalami ajaran-ajaran Al-qur'an dan Sunnah, dan dalam beberapa hal untuk mengembangkan pemahaman dalam rangka melaksanakan kandungan ajarannya menuju tercapainya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup disebut hukum. Dalam ilmu ushul fiqh, hukum didefinisikan sebagai perintah Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan dan haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah, yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum itu yang menjadikan dua hal yang berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat, atau rintangan terhadap yang lain (Khallaf, 1978 : 100).

Hukum Islam yang diperoleh melalui ketentuan nash Al-qur'an dan Sunnah, atau adapula yang diperoleh

ditetapkan dengan jalan ijtihad, harus mutlak memperhatikan jiwa dan tujuan ketentuan nash khususnya, dan jiwa serta tujuan ajaran Islam pada umumnya, yang sering disebut ruh dan maqashid al-syari'ah. Ruh syari'ah menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dalam menjalani di dunia melaksanakan pengabdian kepada Allah Swt, dan maqashid atau tujuan syari'ah adalah mendidik pribadi agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakatnya, menegakkan keadilan dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan. Tujuan syari'ah yang demikian itu telah tercermin dalam nash-nash Al-qur'an dan Sunnah.

Suatu hal yang mustahil diingkari adalah adanya kaitan hukum-hukum nash dengan realitas sosial pada saat nash diturunkan atau dinyatakan, baik yang berupa ayat-ayat Al-qur'an maupun yang berupa Sunnah. Beberapa nash hukum mencerminkan realitas sosial ditempat dan pada saat di nashkan. Betapa hukum Islam sudah jauh ketinggalan dari derasnya perkembangan zaman, dan kalau hal tersebut ditujukan pada hukum Islam (fiqh) yang statis kiranya wajar saja, sebab jikalau diakui obyek fiqh adalah perilaku/perbuatan orang mukallaf, maka perkembangan dan keaneka ragaman perilaku manusia tidak mungkin dapat dijawab oleh sesuatu yang bersifat statis, yang dibatasi oleh kurun waktu sekian abad yang telah berlalu.

Sehubungan dengan realita di atas, maka kita perlu mengkaji hukum Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Timur secara mendalam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Islam ada yang termaktub dalam nash-nash Al-qur'an dan Sunnah, dan adapula yang merupakan hasil ijtihad para ulama.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, hukum-hukum nash masih dipertanyakan sejauh mana sifat mengikatnya mutlak atau tidak mutlak, sejauh mana membedakan antara isi yang tersurat dalam permukaan dan jiwa yang terkandung di dalamnya, sejauh mana harus dipertahankan sebagaimana termaktub di dalam nash, dan kemungkinan diadakan variasi penerapannya bila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang dijumpai disuatu tempat pada masa tertentu.

Mengenai hukum-hukum ijtihadiyah tidak menjadi masalah, sebab ijtihad tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti hukum-hukum nash. Perubahan pada hukum-hukum ijtihad sangat dimungkinkan, sesuai tuntutan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Melihat kenyataan bahwa setiap masyarakat dan kebudayaannya pasti mengalami perubahan-perubahan, dan cepat atau lambatnya perubahan sosial itu tergantung pada ada atau tidaknya faktor-faktor yang dominan yang bisa mempengaruhinya.

Karena sebagaimana kita ketahui, bahwa spesialisasi bidang-bidang ijtihad kiranya telah tiba saatnya untuk dipikirkan, mengingat perkembangan hukum di Jawa-Timur semakin dinamis dalam menghadapi realita kehidupan dewasa ini. Kodifikasi atau Kompilasi Hukum Islam sangat membantu pemasyarakatan hukum Islam, bahkan sangat besar artinya bagi pembangunan hukum nasional kita, khususnya di Jawa Timur. Mengingat di Jawa Timur mayoritas penduduknya beragama Islam.

Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, patutlah dipertanyakan, apakah hukum Islam itu bisa tetap eksis dan relevan dalam menghadapi perubahan sosial atau tantangan zaman.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah : "Proses tata pikir hukum Islam menurut ulama di Jawa Timur". Agar masalah ini lebih jelas, perlu di hubungkan dengan subyeknya, yaitu ulama yang terkait dalam bidang fatwa-fatwa hukum Islam dalam hal mu'amalah, yang meliputi masalah bank mu'amalat, zakat profesi dan reaktualisasi. Dengan kata lain : "Proses tata pikir hukum Islam menurut ulama di Jawa Timur dalam bidang mu'amalah".

